

SKRIPSI
“IMPLEMENTASI KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KELOMPOK
TANI DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
AMPANG RIWO KABUPATEN DOMPU”
(Studi kasus di Desa Serakapi, KecamatanWoja, Kabupaten Dompus)

THE IMPLEMENTATION OF FORESTRY PARTNERSHIPS BETWEEN
FARMER GROUPS AND THE AMPANG RIWO PROTECTED FOREST
MANAGEMENT UNIT DOMPU DISTRICT
(case Study in Serakapi, Village Woja Subdistrict Dompus District)



Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

DI SUSUN OLEH:

CANDRA
216110008

JURUSAN URUSAN PUBLIK
KONSENTRASI KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

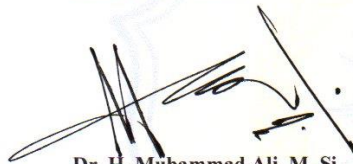
Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan ke panitia ujian skripsi program studi Administrasi Publik pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Januari 2020

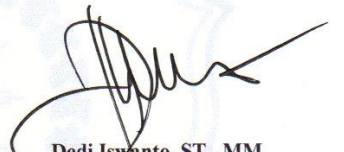
Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dr. H. Muhammad Ali, M. Si
NIDN. 0806066801

Dosen Pembimbing II



Dedi Iswanto, ST., MM
NIDN. 0818087901

Mengetahui,

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Rahmad Hidavat.S.AP.,MAP

NIDN. 0822048901

PENGESAHAN SKRIPSI
**IMPLEMENTASI KEMITRAAN KEHUTANAN ANTARA KELOMPOK
TANI DENGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG (KPHL)
AMPANG RIWO KABUPATEN DOMPU**

Oleh :

Candra

NIM. 216110008

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Sarat Ujian Guna Memperoleh Sarjana Pada
Jurusan Urusan Publik Telah Disetujui Oleh Tim Penguji
Pada tanggal seperti yang tertera dibawah ini.

Mataram, 01 Febuary 2020

Tim Penguji

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M. Si**
NIDN. 0806066801
2. **Dedi Iswanto. ST., MM**
NIDN. 0818087901
3. **Amin Saleh, S. Sos., M.I. Kom.**
NIDN. 0831128310


Ketua

Anggota

Anggota

Mengesahkan,
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Dekan


(Dr. H. Muhammad Ali, M.Si)
NIDN. 0806066801

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan dokter) baik di Universitas Muhammadiyah Mataram maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disibukan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Mataram, 28 Januari 2020



CANDRA

NIM. 21610008



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CANDRA
NIM : 216110008
Tempat/Tgl Lahir : DAMPU, 11 Oktober 1997
Program Studi : ADM. Publik.
Fakultas : FISI.POL
No. Hp/Email : 082 341 343 576
Jenis Penelitian : ☒ Skripsi ☐ KTI ☐

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Kamisan Keluturan
Kelompok Tani Degan Keawan Pengelakan
Hutan Lindung (KPHL) Ampog Kiwo
Kabupaten Dampu

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 18 Februari 2020

Penulis



Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Berangkatlah dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi semua cobaan. Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali. Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada, kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon.”

CANDRA

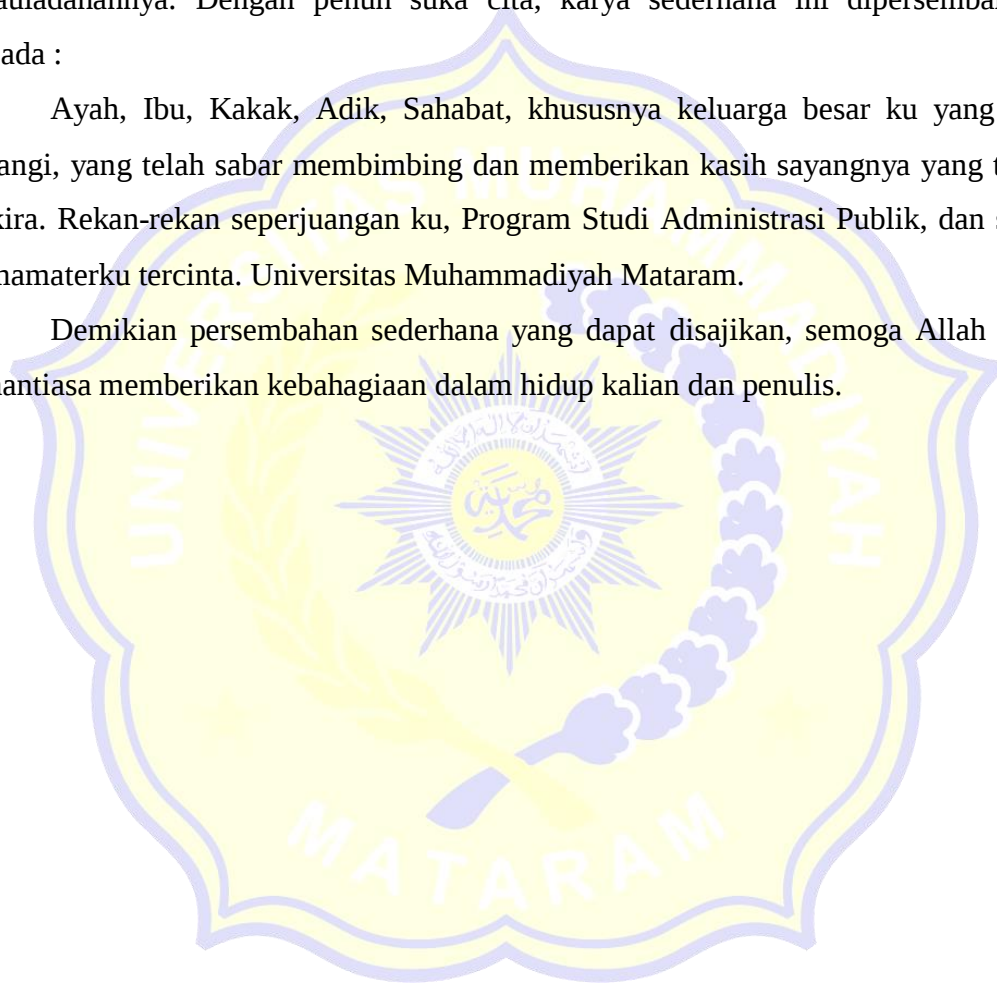


HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Karena atas segala nikmat dan karunia-Nya karya ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam haturkan kepada Nabi Muhammad SAW atas petunjuk dan ketauladanannya. Dengan penuh suka cita, karya sederhana ini dipersembahkan kepada :

Ayah, Ibu, Kakak, Adik, Sahabat, khususnya keluarga besar ku yang aku sayangi, yang telah sabar membimbing dan memberikan kasih sayangnya yang tiada terkira. Rekan-rekan seperjuangan ku, Program Studi Administrasi Publik, dan serta Almamaterku tercinta. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian persembahan sederhana yang dapat disajikan, semoga Allah Swt. Senantiasa memberikan kebahagiaan dalam hidup kalian dan penulis.



Candra. 2020. **Implementasi Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani dengan Kesatuan Pengeloaan Hutan Lindung (KPHL) Ampang Riwo Kabupaten Dompu**. Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Ali, M. Si.
Pembimbing II : Dedi Iswanto, S.T., M.M.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang artinya data yang dikumpulkan bukan berupa analisis angka-angka statistik melainkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Ampang Riwo Kabupaten Dompu dengan penentuan sumber data dilakukan dengan teknik *snowball sampling*.

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data menggunakan metode kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Serakapi yang merupakan kelompok tani dan kesatuan pengelolaan hutan lindung. Kemitraan dianalisis dan dideskripsikan melalui implementasi pada program penghijauan kembali hutan lindung.

Penelitian ini menunjukkan implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan kesatuan pengelolaan hutan lindung memberikan arah pengelolaan sumber daya hutan dengan memadukan aspek-aspek ekonomi, ekologi dan sosial secara proporsional. Implementasi kemitraan tersebut meliputi sosialisasi, pembentukan kelompok, pelatihan, penandatanganan kerjasama, dan pelaksanaan kemitraan kehutanan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya, baik dalam bidang kebijakan publik maupun bidang administrasi publik pada umumnya.

Kata kunci: *implementasi, kemitraan, dan kelompok tani dengan kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Ampang Riwo*

Candra. 2020.
**Implementation of Forestry Partnership between Farmer Group and Forest
Protection Management Unit at Ampang Riwo, Dompu Regency.**

Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram
Consultant I: Dr. H. Muhammad Ali, M. Si.
Consultant II: Dedi Iswanto, S.T., M.M.

ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative research, which means that the data collected is not in the form of statistical analysis but rather comes from interview texts, field notes, personal documents, and other official documents. This study aims to describe the implementation of forestry partnerships between farmer groups and the protected forest management unit (KPHL) of Ampang Riwo, Dompu Regency, with the determination of data sources by snowball sampling technique.

Data collection was carried out using three methods, namely the observation method, the interview method and the documentation method. Data analysis using qualitative methods consisting of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The data source in this study is the Serakapi village community which is a farmer group and protected forest management unit. The partnership was analyzed and described through implementation of the reforestation program of protected forests.

This research shows that the implementation of forestry partnerships between farmer groups and protected forest management units provides direction for managing forest resources by proportionally combining economic, ecological and social aspects. The implementation of the partnership includes socialization, group formation, training, signing of cooperation, and implementation of forestry partnerships. This research is expected to be a reference and reference for further research, both in the field of public policy and the field of public administration in general.

Keywords: implementation, partnership, and farmer groups with the protected forest management unit (KPHL) Ampang Riwo

KATA PENGANTAR

Segalah Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *"Implementasi Kemitraan Kehutanan antara Kelompok Tani dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ampang Riwo Kabupaten Dompu"*. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan program strata-1 di Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Rahmad Hidayat, S.AP, M.AP selaku Ketua Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dengan sabar dan teliti kepada Peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dedi Iswanto, S.T., MM sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan berbagai macam saran dan kritikan sehingga skripsi ini berjalan dengan benar.
6. Orang tua peneliti yang selalu memberikan Doa dan motivasi serta dukungan semangat bagi peneliti agar dapat menyelesaikan proposal ini dengan baik.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik dan semua pihak yang telah memberikan masukan dorongan serta semangat motivasi bagi peneliti.

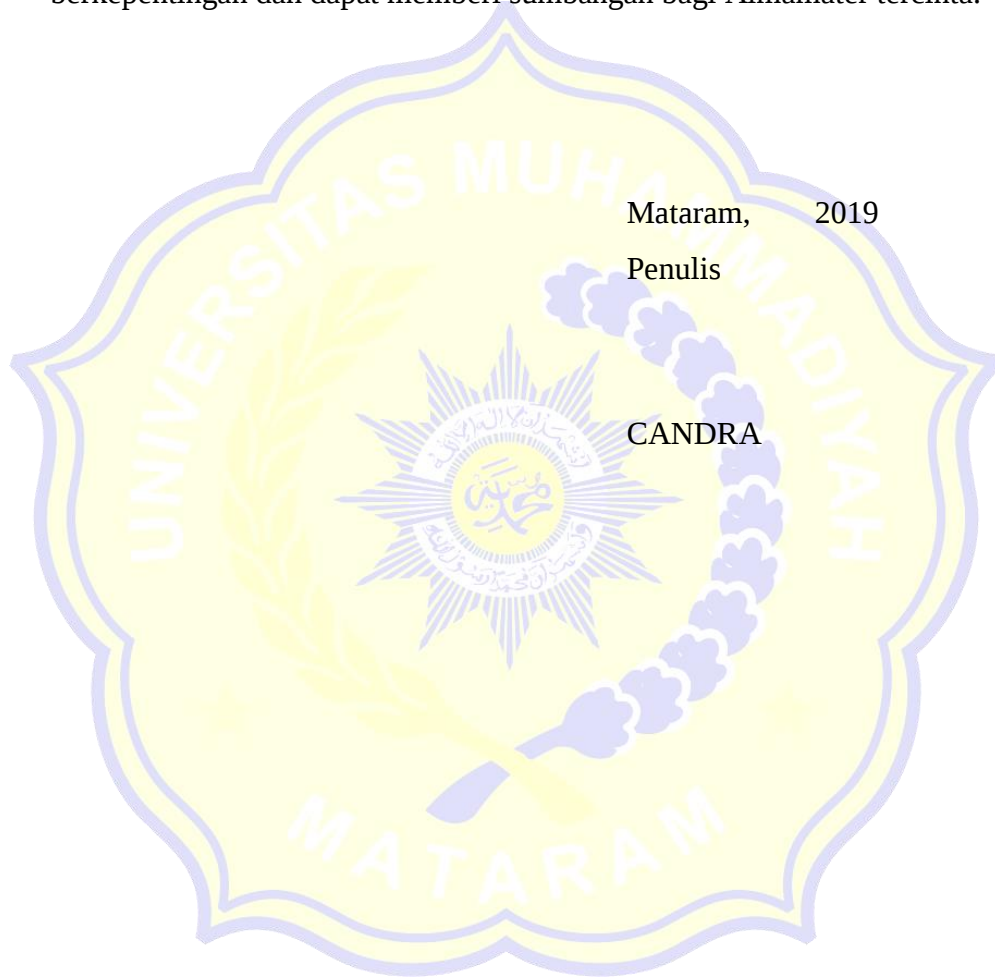
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah tulus dan ikhlas memberi doa dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang telah disusun dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dan pembaca pihak lain yang berkepentingan dan dapat memberi sumbangan bagi Almamater tercinta.

Mataram, 2019

Penulis

CANDRA



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Penelitian Terdahulu	6
2.2. Landasan Teori.....	9
2.2.1 Hutan.....	9

2.2.2. Kesatuan Pengelolaan Hutan	11
2.2.3. Penguasaan Lahan	12
2.2.4. Kemitraan	13
2.2.5. Pengelolaan Hutan	15
2.2.6. Kebijakan Publik	16
2.2.7. Model Implementasi Kebijakan.....	18
2.2.8. Pelayanan Publik	24
2.2.9. Kerangka Konsep Penelitian.....	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN	28
3.1. Jenis Penelitian.....	28
3.2. Waktu dan Lokasi Penelitian	29
3.3. Penentuan Informan	30
3.4. Jenis dan Sumber Data	31
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6. Teknik Analisa Data.....	34
3.7. keabsahan Data.....	35
BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.1. Profil Desa Serakapi.....	37
4.1.2. Profil KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu	38
4.2. Pembahasan.....	45
4.2.1. Hutan Lindung	45

4.2.2. Kemitraan Kehutanan.....	45
4.2.3. Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Ampang Riwo Kabupaten Dompu	47
4.2.4. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Proses Implementasi Kemitraan Kehutanan Antara Kelompok Tani Dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu.....	49
4.2.5. Analisis Deskriptif	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1. Kesimpulan	53
5.2. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu	6
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Serakapi Berdasarkan Jenis Kelamin	36
Tabel 4.2. Pembagian Blok Wilayah KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu berdasarkan Blok dan Kelompok Hutan.	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Letak Wilayah KPHL Ampang Riwo Provinsi NTB.37



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hutan Indonesia sangat terkenal dengan keanekaragaman hayati. Tanaman dan satwa yang hidup dalam hutan merupakan potensi hutan yang tidak boleh diabaikan. Dalam kaitan dengan keanekaragaman hayati, komponen-komponen hutan tersebut Menyediakan berbagai tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai penyedia oksigen, bahan makanan, bahan bangunan, serta obat-obatan. Tidak ketinggalan, hutan merupakan obyek wisata. Diperkaya oleh satwa yang menghuni hutan, semakin lengkap peranan hutan sebagai kawasan yang kaya unsur-unsur kehidupan yang ada di dalamnya (Walhi 2004). Hutan merupakan salah satu sumber daya alam dan menjadi penyangga kehidupan yang keberadaanya tak tergantikan. Oleh karena itu setiap upaya untuk pengelolaan hutan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip kelestarian (*sustainable*) dalam rangka menjamin eksistensi/keberadaan hutan lestari. Berpijak pada prinsip kelestarian tersebut, telah ditetapkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini telah menjadi landasan penyelenggaraan sektor kehutanan secara nasional, disamping itu telah diamanatkan bahwa semua hutan di wilayah Republik Indonesia (RI) termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan hutan secara lestari dapat diwujudkan dengan membagi habis seluruh kawasan hutan ke dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan baik Kesatuan

Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), maupun Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP). Oleh karena itu dibutuhkan suatu penyelenggaraan pengelolaan hutan di tingkat tapak, melalui pembentukan unit pengelolaan hutan atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Seluruh kawasan hutan di Indonesia akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH serta akan menjadi bagian penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, unit pengelolaan hutan terdiri dari KPHK, KPHL, KPHP. Sebagai pengelola hutan di tingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat strategis dalam konteks pembangunan kehutanan secara nasional.

Amanah dan peran strategis KPH tersebut Seharusnya mampu mengatasi permasalahan yang sedang terjadi di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas hasil hutan dan lahan. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan adanya kegiatan seperti penebangan liar, perambahan dan alih guna lahan atau konversi menjadi lahan pertanian atau lahan jagung. semua pohon yang ada sudah gundul dan kegiatan perladang liar di kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah melampaui batas atau berlebihan hingga menyebabkan kerusakan serius terhadap kawasan hutan. Oleh karena penggunaan kawasan hutan yang berlangsung seperti ini, maka sangat mungkin untuk menyebabkan Wilayah hutan/lingkungan hidup akan mengalami kekeringan dan banjir.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi gangguan yang mengancam keberadaan hutan. Salah satu cara pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan pembangunan KPH yang merupakan program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki tata kelola hutan dan memperkuat desentralisasi sektor kehutanan. Peran KPH sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan secara nasional (Hamzah, 2014).

Menurut Suryandari dan Alviya (2009) dalam membangun KPH Ampang riwo harus melibatkan partisipasi aktif *stakeholder* lain dan masyarakat untuk menghindari konflik. Syukur (2012) menyatakan bahwa KPH mewakili hampir semua muatan persoalan konflik di hutan-hutan Indonesia, meliputi sosial, ekonomi, tenurial dan politik.

Pola kemitraan atau kerjasama merupakan hal baru dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan dan mencegah terjadinya konflik. Kemitraan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemegang izin pemanfaatan hutan atau pemegang hak pengelolaan dengan masyarakat setempat (Suprpto, 2014).

Menurut Suprayitno (2008) masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, sesungguhnya dapat menjadi pilar bagi terciptanya pengelolaan hutan secara lestari. Nawir (2011) menjelaskan dengan adanya kemitraan telah menyadarkan sebagian besar masyarakat mengenai status hutan negara yang tidak bisa dikonversi.

Kemitraan kehutanan antara pengelola hutan dengan masyarakat diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam pengelolaan hutan. Penelitian tentang implementasi

kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang riwo Kabupaten Dompu penting dilakukan untuk mengetahui proses implementasi program kemitraan dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi kemitraan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang riwo Kabupaten Dompu.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang peneliti di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah proses implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu?
2. Apa sajakah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi program kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu.
2. Untuk mengetahui fakto-faktor pendukung dan penghambat implementasi program kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setiap diadakannya suatu penelitian pasti mempunyai manfaat sehingga bisa dinikmati hasil akhirnya. Dengan diadakanya penelitian ini maka di harapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang diantara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta dapat menjadi referensi tentang kajian kebijakan publik dan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini masyarakat diharapkan akan mendapatkan informasi lebih terkait implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut ditampilkan penelitian terdahulu yang dilakukan pada situasi berbeda, tetapi masih relevan dengan tema penelitian ini yang dapat dijadikan acuan dan perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian diantaranya dapat diekplorasi sebagai berikut:

Pertama, Teguh Pramono. Rizki Yudha Bramantyo. Irham Rahman. Fitri Windrad (2019) melakukan penelitian tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Menemukan bahwa Keberadaan hutan lindung dan hutan produksi yang berdekatan dengan permukiman masyarakat selama ini selalu didera dengan adanya konflik. Konflik tersebut bisa berupa kerusakan lingkungan, pengrusakan hutan, pencurian hasil hutan, sampai pada terjadinya bencana alam. Melalui program kemitraan yang dilakukan oleh perhutani dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dapat meminimalisir dan bahkan meniadakan konflik. disamping berbagai keuntungan lain yang dirasakan oleh masyarakat.

Kedua, Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno (2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Kemitraan Kehutana Antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan Tastura Dengan Masyarakat Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara. Menemukan Bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan dikatakan tinggi berdasarkan total nilai

yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat program kemitraan kehutanan.

Ketiga, Eko Edi Prastyo, Kliwon Hidayat². (2016) melakukan penelitian tentang Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan. Menemukan bahwa program PKPH dijalankan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan Desa Kucur dengan berlandaskan kesepakatan perjanjian yang isinya menjelaskan pengelolaan hutan yang lestari dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan aksesibilitas untuk masyarakat desa hutan yang ingin ikut PKPH dijalankan secara adil dan terbuka.

Untuk lebih jelas dapat dipetakan dalam tabel dibawa ini:

Tabel 2.1. Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
1	Teguh Pramono. Rizki Yudha Bramantyo. Irfan Rahman. Fitri Windrad, 2019	<i>Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Kemitraan Di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri (Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan hidup Dan Kehutanan. No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan kehutanan)</i>	Keberadaan hutan lindung dan hutan produksi yang berdekatan dengan permukiman masyarakat selama ini selalu didera dengan adanya konflik. Konflik tersebut bisa berupa kerusakan lingkungan, pengrusakan hutan, pencurian hasil hutan, sampai pada terjadinya bencana alam. Melalui program

			kemitraan yang dilakukan oleh perhutani dengan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dapat meminimalisir dan bahkan meniadakan konflik. disamping berbagai keuntungan lain yang dirasakan oleh masyarakat.
2	Muzain Abidin, Andi Chairil Ichsan, dan Indriyatno 2018	<i>Implementasi Kemitraan Kehutana Antara Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (BKPHL) Rinjani Barat Pelangan Tastura Dengan Masyarakat Desa Rempek Kabupaten Lombok Utara.</i>	Bahwa proses implementasi kemitraan kehutanan dikatakan tinggi berdasarkan total nilai yang diperoleh dari masing-masing pihak yang terlibat program kemitraan kehutanan

No	Penulis dan Tahun	Judul	Hasil
3	Eko Edi Prastyo, Kliwon Hidayat. 2016	<i>Pola Kemitraan Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Program PKPH di Desa Kucur Dau, Kabupaten Malang)</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan program PKPH dijalankan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan Desa Kucur dengan berlandaskan kesepakatan perjanjian yang isinya menjelaskan pengelolaan hutan yang lestari dan

			meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan aksesibilitas untuk masyarakat desa hutan yang ingin ikut PKPH dijalankan secara adil dan terbuka.
--	--	--	---

Sumber : berbagai jurnal Nasional Thn 2016-2019.

Hasil penelitian yang diangkat oleh peneliti sekarang merekomendasikan model implementasi kemitraan antara kehutanan antara kelompok tani dengan kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL) Ampang Riwo Kabupaten Dompu. Dilihat dari judul yang diangkat oleh peneliti, inilah yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang serta memiliki implikasi yang berbeda pula. Selain penelitian terdahulu yang dipakai sebagai rujukan dalam penelitian ini, makan di eksplorasi/dan di dialogkan teori-teori yang relevan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Hutan

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.

3. Unsur lingkungan.
4. Unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan yang utuh. Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat.

Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:

1. Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membatat, menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.

Mewajibkan kepada pemerintah melalui Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.

2. Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu dimasukkan kedalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan (Yusuf dkk,2011). Arti penting dan

fungsi hutan tersebut dapat menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi berikutnya.

2.2.2 Kesatuan Pengelolaan Hutan

Pengelolaan kawasan hutan tidak terlepas dari persoalan atau konflik lahan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ekonomi, sosial, ekologi dan kebutuhan lahan pertanian. Konflik dalam kawasan hutan terjadi karena rendahnya intensitas pengelolaan, pengamanan dan perlindungan (Sylviani dan Hakim, 2014). Hal ini juga dijelaskan oleh Suryandari dan Sylviani (2010) bahwa lemahnya pengelolaan kawasan hutan merupakan penyebab konflik di dalam kawasan hutan, sehingga diperlukan institusi yang dapat mengelola kawasan hutan dengan lestari. Pembangunan KPH merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut serta untuk mewujudkan kelestarian hutan.

Salah satu hal mendasar dalam pembangunan KPH adalah untuk mewujudkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengelola sumberdaya hutan. Unit pengelolaan KPH perlu didesain sesuai dengan situasi lapangan sehingga pembangunan KPH dapat memungkinkan dicapainya pengelolaan hutan secara berkelanjutan (Supratman, 2008).

Pembentukan KPH merupakan serangkaian proses perencanaan atau penyusunan desain kawasan hutan, yang didasarkan atas fungsi pokok dan peruntukannya, dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan lestari. KPH menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi dan kabupaten. Pembentukan KPH ditujukan untuk menyediakan wadah bagi terselenggaranya kegiatan pengelolaan hutan secara efisien dan lestari (Moyo *et al.*, 2013). Implementasi pembangunan KPH banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial.

Permasalahan dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Permasalahan dari sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model (Alviya dan Suryandari, 2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan pembentukan organisasi KPHP adalah faktor komunikasi, sumber daya dan birokrasi (Hamzah, 2014).

2.2.3 Penguasaan Lahan

Kelestarian hutan dan kehidupan ekonomi masyarakat desa hutan merupakan dua isu penting (Mustofa, 2011). Kondisi masyarakat di sekitar hutan yang masih berada dalam kemiskinan, keterbatasan akses, pengetahuan dan keterampilan tentang hutan dan kehutanan merupakan kendala yang menghambat keikutsertaan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan keberadaan hutan (Ramadoan *et al.*, 2013).

Kawasan yang telah digarap oleh masyarakat untuk pemukiman dan perladangan menggambarkan bahwa kondisinya tidak mendukung kelestarian fungsi kawasan hutan (Sylviani dan Suryandari, 2013). Kondisi ekonomi masyarakat yang berada disekitar hutan merupakan faktor yang sangat menentukan luasnya garapan masyarakat di hutan. Luas garapan di hutan ditentukan oleh tekanan ekonomi masyarakat yang berada di sekitar hutan. Tekanan ekonomi merupakan motivasi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan keluarga melalui penggarapan lahan di hutan (Subarna, 2011).

2.2.4 Kemitraan

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan (Jasuli, 2014). Menurut Akhadi *et al.* (2013), kemitraan adalah kata kunci dalam mewujudkan sinergi dalam rangka penerapan *good governance* dalam pembangunan kehutanan dengan memperhatikan aspek transparansi dan keadilan antar semua unsur mulai dari proses penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan kehutanan.

Pengelolaan hutan melalui skema kemitraan, baik bagi pemegang izin usaha pemanfaatan HPH/HTO maupun KPH dapat bermitra dengan masyarakat yang hidupnya dari hasil hutan dan lahan hutan (Fadila, 2015). Skema kemitraan kehutanan digagas sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Skema ini juga sebagai wahana penyelesaian konflik atas sumberdaya hutan yang terjadi antara pengelola hutan dan unit manajemen hutan dengan

masyarakat yang sudah memanfaatkan kawasan hutan. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui kemitraan kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat (Adnan *et al.*, 2015).

Tujuan kemitraan kehutanan dalam pemberdayaan masyarakat setempat adalah memberikan akses dan penguatan kapasitas masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat hutan secara langsung. Mengajak masyarakat ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari. Masyarakat secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional (Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.39/Menhut-II/2013). Efendi *et al.* (2007) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat sekitar hutan alam produksi dengan pola kemitraan efektif dilaksanakan dalam rangka mencegah *illegal logging*. Lowisada (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Pendapatan antara petani pola kemitraan dengan petani non kemitraan mempunyai perbedaan yang signifikan. Pola kemitraan memiliki nilai yang lebih tinggi dan hasil usaha yang lebih efisien dibandingkan dengan pola non kemitraan. Adanya perbedaan ini disebabkan oleh adanya jaminan serta ada pengawasan dan bimbingan yang diberikan oleh mitra (Utami *et al.*, 2015). Tingkat keberhasilan kemitraan menentukan manfaat bagi petani. Manfaat bermitra dapat tercapai

sepanjang kemitraan yang dilakukan berdasarkan pada prinsip saling memperkuat, memerlukan dan menguntungkan (Syafaaty, 2014).

Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya hutan, negara harus memperhatikan kondisi dan permasalahan sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, antara lain kepadatan penduduk yang semakin tinggi dan peningkatan kebutuhan pangan serta tingginya angka pengangguran. Permasalahan diatas menjelaskan bahwa upaya pelestarian hutan adalah sesuatu yang mustahil tanpa dukungan dan peran serta dari masyarakat. Masyarakat yang tidak dilibatkan dan tidak mendapat kontribusi yang berarti dari proses pembangunan hutan akan menjadi perusak sumberdaya hutan. Masyarakat yang mendapat peran yang sesuai dalam pembangunan kehutanan dapat menjadi pendorong bagi keberhasilan dalam berbagai kegiatan rehabilitasi hutan (Siswoko, 2009).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan bersama membuahkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong serta tingkat kerusakan dan pencurian kayu menurun. Hal ini dikarenakan masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan dan kegiatan reboisasi. Masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga terjaga kelestarian dan keamanan hutan (Damayatanti, 2011).

2.2.4 Pengelolaan Hutan

Pengelolaan hutan adalah penggunaan cara-cara manajemen dan teknis-taknis kehutanan dalam menjalankan aktivitas terhadap suatu areal hutan. Pengelolaan hutan secara lestari harus mencakup beberapa fungsi teknis, finansial, personal,

fungsi administrasi dan fungsi kepemimpinan yang berkaitan dengan unsur-unsur manajemen (POAC).

Beberapa unsur manajemen tersebut yaitu:

a. perencanaan (*Planning*)

Adalah kegiatan berkaitan dengan pemilihan alternatif, kebijakan, prosedur dan program sebagai bentuk usaha untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

adalah suatu tindakan menggabungkan seluruh potensi dalam kelompok orang atau bagan organisasi untuk bekerja bersama-sama guna mencapai tujuan bersama baik pribadi maupun kelompok.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

adalah implimentasi dari perencanaan dan pengorganisasian dimana seluruh komponen bekerja sama sesuai dengan bidang masing-masing untuk dapat mewujudkan tujuan.

d. Pengawasan (*controlling*)

merupakan pengendalian kegiatan dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan apakah semua kegiatan tersebut memberikan hasil yang efektif dan efisien. (Hasibuan, 2009).

2.2.6 Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau policy berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi “*politia*” yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris “*policie*”

yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk keperluan pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik.

Budi Winarno (2007:16) menyebutkan secara umum istilah “kebijakan” atau “*policy*” digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok maupun suatu lembaga pemerintahan) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, pengertian kebijakan seperti ini dapat kita gunakan dan relatif memadai untuk pembicaraan-pembicaraan-pembicaraan biasa, namun menjadi kurang memadai untuk pembicaraan-pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik oleh karena itu diperlukan batasan atau konsep kebijakan publik yang lebih tepat.

Makna kebijakan menurut Friedrich yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (1997 : 3) adalah: Kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Frederickson dan Hart dalam Tangkilisan (2003:19), mengemukakan kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sementara itu, Howlet dan M. Ramesh menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan agenda (*agenda setting*), yakni suatu proses agar suatu masalah bisa mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (*decision making*), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan sesuatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

2.2.7 Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu

langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan

Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Menurut pandangan Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

a. Komunikasi

yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya

Yaitu meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya

tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c. Disposisi

adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

2. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan.

- b. Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*.
- c. Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
- f. Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

3. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Subarsono, 2011: 94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011: 99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008: 175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- 1) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia

harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. 2) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-intruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan. 3) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Struktur Birokrasi menurut Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni *Standard Operating Procedures* (SOP) dan Fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif,

kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

2.2.8 Pelayanan Publik

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Menurut Ridwan dan Sudrajat (2009:19) pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara terhadap masyarakat nya guna memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri dan memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan terhadap masyarakat disebut juga sebagai pelayanan publik atau juga pelayanan umum dimana pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 adalah “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut Moenir (2002:12) pengertian pelayanan umum adalah “Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang ditujukan guna memenuhi kepentingan orang banyak. Pelayanan tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung pelayanan umum yang penting peranannya.

Menurut Moenir (2002:88) ada enam faktor yang dapat mendukung pelayanan umum, yaitu:

1. Faktor kesadaran, yaitu kesadaran para pejabat serta petugas yang berkecimpung dalam pelayanan umum.
2. Faktor aturan, yaitu aturan yang menjadi landasan kerja pelayanan.
3. Faktor organisasi, yaitu organisasi yang merupakan alat serta sistem yang memungkinkan berjalannya mekanisme kegiatan pelayanan.
4. Faktor pendapatan, yaitu pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
5. Faktor keterampilan petugas.
6. Faktor sarana dalam pelaksanaan tugas pelayanan.

Dari keenam faktor itu masing-masing mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling berpengaruh satu sama lainnya dan secara bersama-sama pula akan mewujudkan pelaksanaan pelayanan secara baik, berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau pelayanan dalam bentuk gerakan/tindakan dengan atau tanpa peralatan.

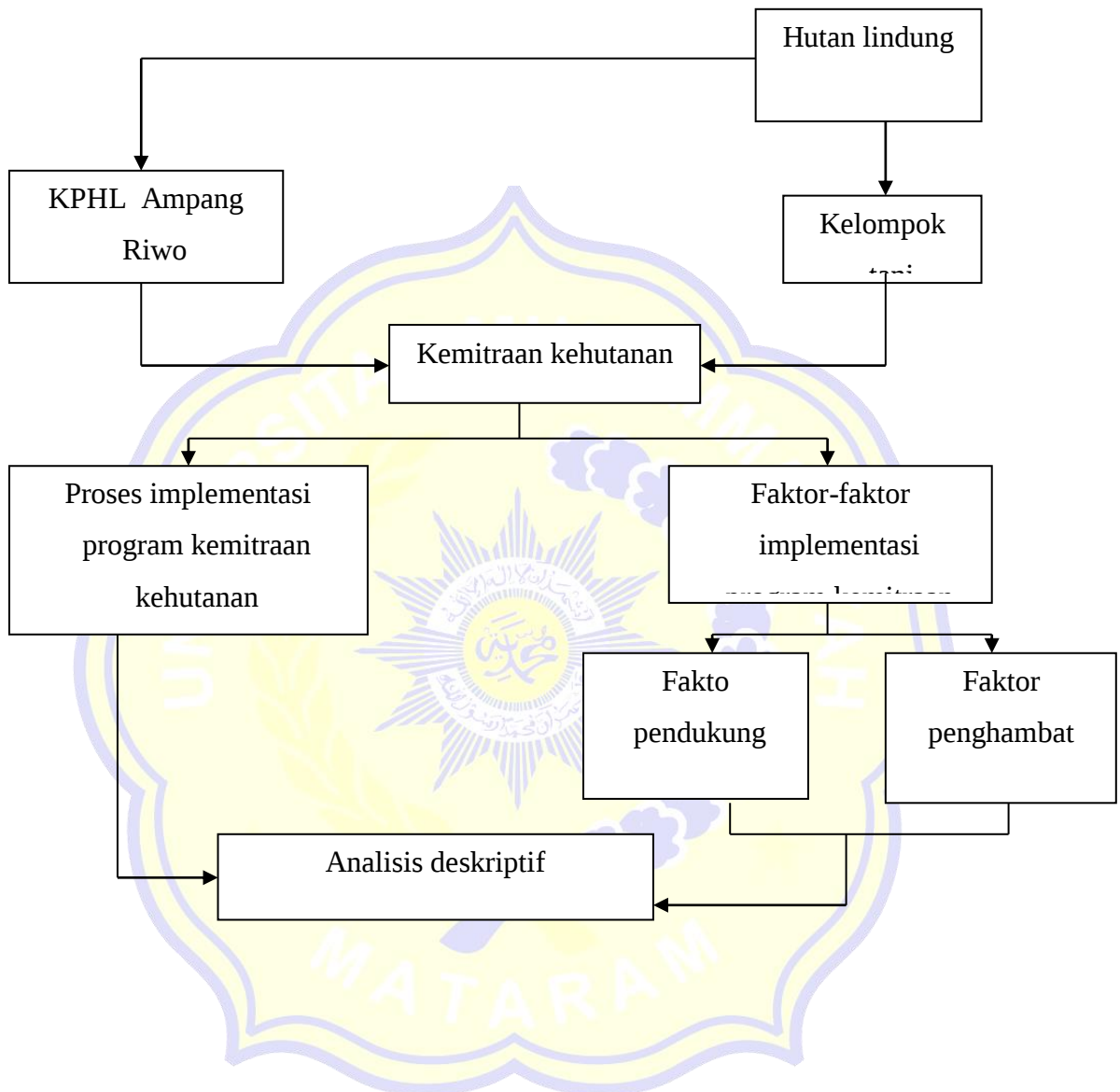
2.2.9 Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan-permasalahan kondisi hutan di Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat, saat mengalami penurunan baik dari segi kualitas maupun kuantitas hasil hutan dan lahan. Penyebab penurunan tersebut dikarenakan adanya kegiatan seperti penebangan liar, perambahan dan alih guna lahan atau konversi menjadi lahan

pertanian atau lahan jagung dan semua pohon yang ada sudah gundul. Kegiatan perladang liar di kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat setempat sudah melampaui batas atau berlebihan hingga menyebabkan kerusakan serius terhadap kawasan hutan. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU ini telah menjadi landasan penyelenggaraan sektor kehutanan secara nasional, disamping itu telah diamanatkan bahwa semua hutan di wilayah RI termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dari itu Kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang riwo Kabupaten Dompu diharapkan menjadi solusi yang tepat dalam pengelolaan hutan. Penelitian implementasi kemitraan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo ini dilakukan untuk melihat proses implementasi kemitraan kehutanan dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang mempengaruhi implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dan KPHL Ampang Riwo. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

a. Kerangka Pemikiran



BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa analisis angka-angka statistik, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya.

Menurut David William dalam Moleong (2006:5) menulis bahwa “penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”.

Selanjutnya, masih menurut Moleong (2006:6) yang menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah peneliti yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Dengan metode penelitian ini penulis merasakan cukup memudahkan dalam melaksanakan penelitian dikarenakan data yang dikumpulkan penulis bukan merupakan data statistik.

Menambahkan menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2002:17), penelitian kualitatif yaitu “penelitian yang lebih menekankan pada pengungkapan makna dan

proses, latar belakang alamia (*natural setting*) dan digunakan sebagai sumber data langsung dari peneliti sendiri sebagai instrumen kunci”. Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berhubungan dengan implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampar Riwo Kabupaten Dompu, serta faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi kemitraan kehutanan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu.

Penelitian kualitatif ini tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif deskriptif dengan secara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari objek yang diteliti.

Menurut Faisal (2005:18) “Penelitian deskriptif yaitu sekedar untuk melukiskan atau menggambarkan (*deskripsi*) Sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”. Lebih Faisal (2005:20) menjelaskan bahwa “penelitian deskriptif dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti”.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Serakapi Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Penelitian akan dilakukan pada bulan Desember sampai dengan selesai. Dipilihnya lokasi ini karena dirasakan dapat memberikan informasi yang akurat

mengenai implementasi kemitraan antara kelompok tani dengan KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu.

3.3 Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sangat erat kaitanya dengan faktor-faktor kontekstual. Sehingga dapat menjangkau sebanyak mungkin informasi atau data dari berbagai sumber yang ada. Tujuannya adalah merinci kekhususan yang ditemukan kedalam konteks yang ada, dan menggali informasi sebanyak mungkin dari informan untuk dipergunakan sebagai dasar dari rancangan dan teori yang muncul.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik *snowball sampling* atau teknik bola salju. Menurut Sutopo (2002:370) menyatakan bahwa “Penelitian yang menggunakan teknik *snowball sampling* yaitu penelitian tanpa rencana, mengorek informasi kepada informan satu yang kemudian menunjukan informan kedua dan demikian juga dengan informan ketiga terus sampai dirasa informasi yang diperoleh lengkap dan mendalam”. *Snowball sampling* dilakukan untuk melengkapi informasi yang ada sehingga dalam proses pengumpulan data, peneliti tidak membatasi jumlah informan dan lebih memilih informan yang mengetahui masalah secara mendalam.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Pihak pengelola KPHL Ampang Riwo Kabupaten Dompu, Kelompok tani dan masyarakat yang berada di Desa Serakapi, Kec. Woja, Kab. Dompu, serta informan lain yang dianggap mempunyai hasil mendalam.

3.4 Jenis dan Sumber data

3.4.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada dua macam yaitu:

a. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:146) "data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya (tidak melalui media prantara)". Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara peneliti dengan informan secara langsung.

b. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2002:147) data sekunder merupakan "sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media prantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)". Yang menjadi data sekunder yaitu terdiri dari surat kabar, undang-undang yang menyangkut dengan pelayanan, buku daftar tamu dan lain-lainya.

3.4.2 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, jenis sumber data yang berupa manusia dalam penelitian pada umumnya sebagai responden (responden). Posisi sumber data yang berupa manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (Sutopo, 2006:57-58).

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film (Moleong, 2007:157). Peneliti berkerja menyesuaikan bidang kajian yang menjadi objek penelitiannya. Peneliti berkerja dengan cara mengumpulkan data dari induktif secara kumulatif yang nantinya dibuat laporan yang lebih lengkap. Pelaporan dibuat dengan mengelompokkan data-data yang sejenis dan diberi kode tersendiri. Data-data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan dokumentasi (pengumpulan bukti, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi).

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data yang diperoleh secara lisan dan tertulis. Adapun tekni pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Metode observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang terstandar (Suharsimi Arikunto, 2010:265). Observasi merupakan bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara pengamatan kejadian dan pencatatan dengan sistematis

terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Observasi bukan hanya menentukan siapa yang akan diwawancara melainkan juga menetapkan konteks, kejadian, dan prosesnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Sudijono (1996:82) ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam, yang diinterview bisa mengungkapkan isi hatinya secara lebih luas, pertanyaan yang tidak jelas bisa diulang dan diarahkan yang lebih bermakna.

3. Dokumentasi

Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Nawawi (2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2006:248) analisis data yaitu: upaya yang dilakukan dengan jalan yang bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain. Dengan demikian, data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan atau dokumentasi akan di analisis dan ditafsirkan untuk menegetahui maksud serta maknanya, kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. Data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi dan kutipan langsung dari hasil wawancara.

Secara persial prosedur analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data dari Milles dan Huberman (2000:15-21) yaitu analisis interaktif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian kemudian observasi langsung lapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapat sumber data yang diharapkan.
2. Reduksi data yaitu proses pemilihan proses pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan selama penelitian tujuan diadakan transkrip data (transformasi

data) untuk memilih transformasi data yang sesuai dengan masalah yang terjadi pusat penelitian lapangan.

3. Penyajian data (data display) yaitu kegiatan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam tabel atau uraian penjelasan. Penyajian data atau *display* data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
4. Menarik kesimpulan (verifikasi) yaitu mencari arti pola-pola penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi. Verifikasi dalam penelitian kualitatif ini dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian sejak awal memasuki lapangan dan sepanjang proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan.

3.7 Keabsahan Data

Agar data yang diperoleh dijamin keabsahannya sehingga dapat dipertanggung jawabkan hasil penelitiannya, maka perlu melakukan triangulasi. Menurut Moleong (2011:330) "Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai penanding untuk data itu". Menurut Danzim dalam Moleong (2011:330) membedakan "empat macam Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik, dan teori*."

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan penggunaan *sumber*. Menurut Patton dalam Moleong (2011:330) menyebutkan bahwa Triangulasi dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang membedakan dalam penelitian kualitatif”. Pengecekan keabsahan data dengan *sumber* menurut Moleong (2011:331) dapat diketahui dengan cara:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dan apa yang dikatakan orang secara pribadi.
- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandikan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
- e. Membandikan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini untuk mengecek keabsahan data, peneliti lebih memfokuskan kepada membandikan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.